

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan. Hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Pembangunan dilaksanakan mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti salah satunya kemiskinan (Puspita, 2015). Permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara yang menyangkut kesejahteraan masyarakat adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Sri, 2010). Kesejahteraan dapat diartikan salah satunya dengan tingkat kemiskinan penduduk. Kesejahteraan sendiri mempunyai hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan, semakin rendah tingkat kemiskinan maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk.

Kemiskinan sebagai masalah berskala nasional selalu dihadapi setiap pemerintahan. Kemiskinan terjadi dari akumulasi berbagai persoalan dan melibatkan banyak dimensi pokok. Menurut Makmun dalam Rusdarti (2013), “kemiskinan memiliki empat dimensi pokok, yaitu: (1) kurangnya kesempatan/*lack of opportunity*; (2) rendahnya kemampuan/*low of capabilities*; (3) kurangnya

empowerment, Bank Dunia sendiri menyebut bahwa kemiskinan sebagai hasil dari akuntabilitas dan responsibilitas institusi negara (World Bank, 2001)”. Menyadari bahwa kemiskinan bersifat multi-dimensi dan mencerminkan akuntabilitas dan responsibilitas dari institusi negara, maka upaya pengentasan kemiskinan menjadi salah satu obyek tanggungjawab pemerintah.

Salah satu wilayah yang cukup tinggi tingkat kemiskinannya adalah Pulau Jawa. Sebanyak 13,62 juta penduduk miskin yang menghuni Pulau Jawa dengan jumlah persentase sebesar 8,79%, artinya setengah populasi penduduk miskin di Indonesia terdapat di Pulau Jawa.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
DI Yogyakarta	448,470	11,49
Jawa Tengah	3.791.500	10,98
Jawa Timur	4.188.810	10,49
Jawa Barat	3.888.600	7,98
Banten	826.130	6,24
DKI Jakarta	477.830	4,61

Sumber : BPS Tahun 2022

Berdasarkan data tabel 1.1 persentase penduduk miskin di Pulau Jawa yang tertinggi yaitu terletak di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 11,49%, sedangkan persentase penduduk miskin yang terendah yaitu terletak di Provinsi DKI Jakarta sebesar 4,61%. Rata-rata persentase penduduk miskin yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 10,98%. Provinsi Jawa Timur rata-rata persentase penduduk miskin yang dimiliki sebesar 10,49%, sedangkan pada Provinsi Banten rata-rata persentase penduduk miskin yang dimiliki sebesar 6,24%. Provinsi Jawa Barat rata-

rata persentase penduduk miskin yang dimiliki sebesar 7,98 persen, dimana terletak pada urutan terbesar ke empat setelah Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dari uraian diatas terlihat bahwa fenomena penurunan kemiskinan di Pulau Jawa masih cukup tinggi. Adanya Pandemi Covid-19 telah menaikkan angka kemiskinan dan menjadi fokus upaya pemerintah mengatasi kemiskinan yang tidak tepat sasaran. Selain itu, kemiskinan tidak diimbangi dengan pemerataan penduduk dan peningkatan kesempatan kerja. Dampak kemiskinan terhadap perekonomian sangat merugikan dan untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kemiskinan di Jawa Barat.

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang memerintahkan agar manusia bekerja keras dan berusaha, mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk merubah nasib menjadi lebih baik, tidak hanya menunggu bantuan semata tanpa adanya usaha. Isyarat tersebut terlihat jelas pada Q.S. Ar-Rad ayat: 11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وََمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya:

"Allah SWT berfirman tentang manusia yang diiringi malaikat sepanjang hari. Ayat ini juga menegaskan bahwa nasib seseorang ditentukan sendiri oleh dirinya. Allah SWT tidak merubah nasib, kecuali atas usaha orang itu sendiri. Surat Ar-Rad adalah surah ke-13 dalam Al-Qur'an."

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kemiskinan masih menjadi perbincangan yang serius dalam masyarakat, karena kita lihat bahwa masih banyak

masyarakat miskin di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat, ditandai oleh banyaknya masyarakat yang masih kekurangan bahan makanan dan banyaknya masyarakat yang masih sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dan banyaknya pengangguran. Ini menandakan bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Barat masih perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Pertumbuhan PDRB, sebagai tolok ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. “Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah”. (Wibisono, 2003).

Permasalahan kemiskinan menuntut adanya campur tangan pemerintah. Dengan adanya campur tangan pemerintah diharapkan permasalahan kemiskinan dapat ditanggulangi. Campur tangan pemerintah lebih kurang sudah sering masyarakat dengar dan rasakan baik dalam tingkat nasional maupun daerah, contoh dalam setiap kampanye pemilihan umum selalu tersodor rencana program penanggulangan kemiskinan, dalam realisasinya pun sudah pernah ada Bantuan Langsung Tunai/Sementara, BOS dalam bidang pendidikan, asuransi kesehatan masyarakat miskin, PNPM (program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri), raskin (beras miskin), dan lainnya. Didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 sendiri sudah diamanatkan bahwa tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini berarti pemerintah bertanggung jawab terhadap masalah kesejahteraan masyarakat, salah satunya

adalah masalah kemiskinan yang dialami oleh setiap warga negaranya. Dumairy (1996) menyebutkan bahwa “pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan kegiatannya, pengeluaran-pengeluaran itu tidak hanya untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian, ini bukan berarti pemerintah ikut berbisnis, melainkan pemerintah harus berkontribusi menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum”.

Permasalahan kemiskinan ini harus diberantas sampai habis sampai akarnya. Maka dari itu ini bukan hanya tugas pemerintah saja yang berjuang mengurangi serta memberantas kemiskinan tetapi ini juga tugas masyarakat yang mana mereka harus berusaha meningkatkan kualitas dirinya sehingga tidak menjadi beban untuk dirinya bahkan untuk negara, disamping masyarakat berusaha meningkatkan kualitas dirinya, pemerintah juga harus mendorong dari sisi sumber dayanya dan pemerataan. “Pentingnya pengentasan kemiskinan menjadi persoalan utama yang dibahas di seluruh dunia, yang dibuktikan dalam SDGs dengan dinyatakan no poverty (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas”. (Nina dan Rustariyuni, 2018).

Selain itu pemerintah sebagai penguasa hendaknya memperhatikan masyarakatnya, berbuat adil, membuat kebijakan yang dimana di prioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang bersifat umum, bukan merupakan fenomena 3 sosial khusus pada masyarakat yang berlatar belakang suku bangsa dan agama. Namun kemiskinan menjadi ukuran martabat suatu negara.

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Inflasi merupakan salah satu faktor yang dianggap menyebabkan tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Barat dapat meningkat. Mengapa bisa dikatakan demikian, karena jika inflasi terjadi harga barang - barang umum akan meningkat, hal tersebut membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari - harinya. Jika hal tersebut terjadi akan membuat masyarakat jauh dari kata sejahtera.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Presentase Penduduk Miskin (%)
2014	4.239,0	9,18
2015	4.435,7	9,53
2016	4.224,3	8,95
2017	4.168,4	8,71
2018	3.615,8	7,45
2019	3.399,2	6,91
2020	3.920,2	7,88
2021	4.195,3	8,40
2022	4.071,0	8,06

Sumber: BPS Jawa Barat 2014-2022

Berdasarkan data Tabel 1.2 dari BPS Provinsi Jawa Barat menunjukkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 4.239,0 jiwa dan mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 4.435,7 jiwa, dan pada 2016 turun menjadi

4.224,3 jiwa, selanjutnya jumlah penduduk miskin selalu mengalami penurunan yaitu pada tahun 2017 menjadi 4.168,4 jiwa, tahun 2018 di angka 3.615,8 jiwa, tahun 2019 di angka 3.399,2 jiwa, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan di angka 3.920,0 jiwa, tahun 2021 diangka 4.195,3 jiwa dan tahun 2022 mengalami penurunan diangka 4.071,0 jiwa. Masalah-masalah kemiskinan yang terjadi lebih dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang saling berkaitan satu dan lainnya. Dalam hal ini, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah Investasi, PDRB, Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah.

Salah satu yang mempengaruhi kemiskinan yaitu investasi, Seperti yang kita ketahui bahwa investasi berperan sebagai salah satu variabel yang menstimulus pertumbuhan ekonomi, yang dimana ketika tingginya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah maka akan semakin rendah juga angka kemiskinan. Sukirno (2000), kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Tabel 1.3

Investasi di Provinsi Jawa Barat

Tahun	Investai (Juta)
2014	6.562,0
2015	5.738,7
2016	5.470,9
2017	5.142,9
2018	5.573,5

2019	5.881,0
2020	4.793,7
2021	5.217,7
2022	6.534,5

Sumber: BPS Jawa Barat 2014-2022

Berdasarkan Tabel 1.3 bisa dilihat bahwa investasi di Provinsi Jawa Barat terus menurun dari tahun 2014-2017. Di tahun 2014 realisasi investasi mencapai angka 5.562,0 dan di tahun 2015 di angka 5.738,7 di tahun 2016 di angka 5.470,9 dan di tahun 2017 5.142,9 tetapi di tahun 2018 ada peningkatan di angka 5.881,0 tahun 2020 mengalami penurunan di angka 4.793,7 dan tahun 2021 mengalami peningkatan di angka 5.217,7 tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi total investasi di tahun tersebut yaitu 6.534,5. Seperti yang kita ketahui bahwa investasi berperan sebagai salah satu variabel yang menstimulus pertumbuhan ekonomi, yang dimana ketika tingginya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah maka akan semakin rendah juga angka kemiskinan. Sukirno (2000), kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Faktor lainnya yaitu PDRB, Kuncoro (2001), menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah konstan dengan peningkatan PDRB. Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi PDRB yang dihasilkan di suatu wilayah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau menekan angka kemiskinan.

Tabel 1.4
PDRB atas Harga Konstan Provinsi Jawa Barat

Tahun	PDRB (Milyar)	Pertumbuhan (%)
2014	1.093.543,55	5,09%
2015	1.206.891,27	5,05%
2016	1.277.312,17	5,66%
2017	1.343.662,14	5,35%
2018	1.419.624,14	5,64%
2019	1.490.959,69	5,02%
2020	1.453.380,72	-2,52
2021	1.507.746,39	3,74
2022	1.589.984,93	5,45

Sumber: BPS Jawa Barat 2014-2022

Berdasarkan Tabel 1.4 menunjukkan PDRB di Povinsi Jawa Barat pada tahun 2014-2019 selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2020 mengalami penurunan dan 2021 sampai 2022 mengalami kenaikan. PDRB menurut BPS dalam Susanti (2013), didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kemiskinan yaitu inflasi. Inflasi juga merupakan salah satu indikator yang penting dalam analisis 7 perekonomian suatu wilayah selain indikator pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat inflasi yang tinggi maka akan dapat menyebabkan kenaikan harga – harga barang, kenaikan harga barang yang tidak didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan dapat memperparah kemiskinan disuatu wilayah karena

harga barang – barang komoditas yang tinggi tidak sesuai dengan pendapatan masyarakat yang rendah.

Tabel 1.5
Inflasi Provinsi Jawa Barat

Tahun	Inflasi (%)
2014	7,60
2015	2,73
2016	2,75
2017	3,63
2018	3,54
2019	3,21
2020	2,18
2021	1,69
2022	6,04

Sumber: BPS Jawa Barat 2014-2022

Berdasarkan tabel 1.5 inflasi terendah provinsi Jawa Barat terjadi pada tahun 2021 sebesar 1,69 persen, pada tahun 2022 meningkat menjadi 6,04% sedangkan laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 7,60. Hal tersebut merupakan masalah cukup serius yang harus dihadapi Provinsi Jawa Barat karena tidak dapat menjaga kestabilan dalam sisi moneter. Laju inflasi provinsi Jawa Barat masih tergolong ringan karena masih dibawah angka 10 persen. Prima Audia Daniel (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa inflasi merupakan suatu keadaan yang terjadi pada perekonomian suatu wilayah yang mengarah kepada kenaikan harga – harga barang atau price level yang terjadi secara berkala yang disebabkan oleh ketidakseimbangan arus barang dan arus uang.

Selain inflasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah sendiri adalah salah satu alat indikator dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memberantas kemiskinan itu sendiri, tetapi faktanya yang terjadi di masyarakat pertumbuhan ekonomi tidak menjangkau kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (Susanti, 2013).

Tabel 1.6
Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Barat

Tahun	Pengeluaran (Ribu)
2014	25.805.636
2015	28.366.703
2016	31.244.462
2017	24.054.880
2018	36.482.714
2019	39.199.187
2020	46.095.261
2021	44.715.065
2022	43.148.654

Sumber: BPS Jawa Barat 2014-2022

Pada Tabel 1.6 Pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Barat ditunjukkan pada Tabel 1.6 yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Belanja pada tahun 2014 sebesar Rp25.805.636.973,03; pada tahun 2015 sebesar Rp 28.366.703.247,66; pada tahun 2016 meningkat kembali menjadi Rp31.244.462.321,49; pada tahun 2017 turun menjadi Rp

24.054.880.848,03; dan pada tahun 2018–2020 terjadi peningkatan. Selain itu, akan menurun pada tahun 2021–2022.

Diprediksi pada penelitian sebelumnya (“Analisis Dampak Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Belanja Bersubsidi Terhadap Kemiskinan di Indonesia”) oleh Misdawita (2013). Ordinary Least Square (OLS) dan Error Correction Model (ECM) adalah metodologi analisis yang digunakan. Dalam studinya, ia mengkaji tiga bidang untuk memahami bagaimana pengeluaran pemerintah mempengaruhi kemiskinan di Indonesia dalam penelitiannya menjelaskan tentang dampak pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia dari 3 sektor yaitu pendidikan, kesehatan, dan subsidi.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu pengeluaran sektor Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan bisa diartikan mungkin penyuluhan yang di berikan kurang tepat sasaran sehingga kurang berdampak terhadap masyarakat, dan yang terakhir adalah subsidi, hasil dari penelitian berpengaruh negatif dan tidak signifikan yang dimana berarti subsidi tidak memberikan dampak terhadap kemiskinan.

Perbedaan penulis dengan peneliti sebelumnya terletak pada teknik analisis data, peneliti sebelumnya menggunakan teknik ECM dan OLS atau juga di sebut analisis linear berganda, sedangkan penulis menggunakan teknik regresi data panel. Pada bagian variabel peneliti sebelumnya membagi variabel pemerintah menjadi 3 variabel berbeda yaitu pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, dan subsidi. Sedangkan penulis menggabungkan seluruh elemen pengeluaran

pemerintah menjadi satu, serta objek penelitian peneliti sebelumnya menjadikan Indonesia sebagai objek penelitian, sedangkan penulis hanya salah satu provinsi yaitu Jawa Barat. Persamaan penelitian terletak di variabel pengeluaran pemerintah dan kemiskinan. Oleh karena itu menjadi sangat menarik untuk mengetahui bagaimana kondisi kemiskinan dan bagaimana pengaruh antara Investasi, PDRB, Pengeluaran pemerintah dan Inflasi terhadap Kemiskinan.

B. Rumusan Masalah

Di dunia ini masih banyak Negara-negara berkembang yang mengalami kemiskinan. Lain halnya di Negara Indonesia, kemiskinan masih menjadi momok penting yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Dimana kemiskinan masih menjadi masalah utama yang harus ditangani. Dan berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dibuat maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat?
4. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini meneliti di 27 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat
2. Penelitian ini memiliki batasan tahun yakni dari tahun 2014 sampai 2022.

3. Penelitian ini meneliti variabel Jumlah Penduduk Miskin sebagai variabel dependen dan Investasi, PDRB, Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah sebagai variabel independen.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah serta perumusan masalah, dapat ditetapkan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Investasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat
2. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat
3. Untuk menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat
4. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat bagi penelitian ini yang kiranya dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan bagi peneliti mengenai Investasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
2. Sebagai bentuk gambaran bagi pemerintah di Provinsi Jawa Barat mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan dengan merancang

kebijakan hingga proses pengambilan keputusan untuk pembangunan ekonomi daerah maupun nasional dan menurunkan tingkat kemiskinan.

3. Dapat memberikan informasi bagi masyarakat dalam mengetahui pembahasan mengenai kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi.